| **Draft Peraturan** | | **Satker Pemberi Tanggapan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |
| RANCANGAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR ... TAHUN …  TENTANG  PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR ... TAHUN …  TENTANG  PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN |  |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM |  |  |  |
| 1. bahwa saat ini perkembangan produk dan layanan di sektor jasa keuangan meningkat dengan pesat seiring dengan munculnya produk dan layanan jasa keuangan yang berasal dari berbagai lembaga jasa keuangan maupun pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan ; | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) khususnya Pasal 6 huruf e dan Pasal 216 telah memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor ITSK, serta aset keuangan digital termasuk aset kripto. Salah satu ruang lingkup ITSK sebagaimana diatur UU P2SK yaitu pendukung pasar dimana salah satu contoh ITSK yang termasuk dalam cakupan pendukung pasar adalah PAJK.  PAJK sebagai penyelenggara ITSK memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi produk dan layanan lembaga jasa keuangan maupun pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang yang dapat memperluas inklusi keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam perluasan inklusi keuangan dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan platform yang dijalankan PAJK, baik dalam kedudukan PAJK sebagai pihak yang memberikan informasi perbandingan produk dan layanan jasa keuangan, melakukan sinergi atas produk dan layanan jasa keuangan, maupun aktivitas lain sesuai dengan batasan kegiatan usaha PAJK .  Selain itu, PAJK juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produk dan layanan jasa keuangan seperti menghilangkan biaya transportasi, mengurangi biaya pencarian informasi, memungkinkan konsumen untuk memiliki pilihan serta mendapatkan produk dan layanan yang paling sesuai dengan profil dan kebutuhan serta mendukung konsumen dan lembaga jasa keuangan maupun pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi.  Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, terdapat berbagai risiko yang dihadapi PAJK seperti pelindungan data pribadi, keamanan siber, serta pelindungan konsumen. Oleh karena itu kerangka regulasi dalam bentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan bagi PAJK diperlukan untuk memastikan kegiatan usaha PAJK dilaksanakan dengan dengan aman dan bertanggung jawab. |  |  |  |
| 1. bahwa untuk mendukung perkembangan produk dan layanan tersebut, diperlukan layanan agregasi yang dapat mempermudah konsumen dalam membandingkan, memilih, dan/atau menggunakan produk serta layanan jasa keuangan yang sesuai dengan profil dan/atau kebutuhan konsumen. |  |  |  |
| 1. bahwa untuk memastikan agar agregasi informasi produk dan layanan jasa keuangan tidak menimbulkan risiko bagi konsumen maupun lembaga jasa keuangan serta pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan, diperlukan kerangka pengaturan yang memadai terutama terkait tata kelola dan manajemen risiko setiap pihak yang akan menjalankan aktivitas sebagai penyelenggara agregasi jasa keuangan; |  |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan; |  |  |  |
| Mengingat: | 1. PASAL DEMI PASAL |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73/OJK). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN |  |  |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |
| Pasal 1 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: |  |  |  |  |
| 1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. |  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK. |  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PAJK adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha agregasi melalui situs *website* atau aplikasi PAJK. |  |  |  |  |
| 1. Agregasi adalah aktivitas PAJK untuk menjalankan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan, penyaringan dan/atau pembandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan antar lembaga jasa keuangan atau antar pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuanga n dengan cara menampilkan informasi, memberikan pilihan, meneruskan informasi konsumen kepada lembaga jasa keuangan atau serta antar pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan atau sebaliknya , dan/atau distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada konsumen. |  |  |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. |  |  |  |  |
| 1. Konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PAJK. |  |  |  |  |
| 1. Direksi adalah organ PAJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PAJK untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan PAJK serta mewakili PAJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. |  |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ PAJK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. |  |  |  |  |
| 1. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau memiliki pengaruh signifikan terhadap PAJK, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali. |  |  |  |  |
| 1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. |  |  |  |  |
| 1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |  |  |  |
| PAJK dinyatakan sebagai pihak yang menyelenggarakan ITSK pada ruang lingkup pendukung pasar. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB II  RUANG LINGKUP |  |  |  |  |
| Pasal 3 |  |  |  |  |
| 1. PAJK dapat melakukan kegiatan usaha Agregasi, meliputi: |  |  |  |  |
| 1. perbandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen; | Cukup jelas |  |  |  |
| 1. penerusan refensi Konsumen potensial kepada LJK LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; | Yang dimaksud referensiKonsumen potensial adalah layanan untuk memberikan rujukan mengenai Konsumen potensial kepada LJK atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.  Rujukan antara lain berupa:   1. Rujukan Konsumen potensial dari PAJK kepada LJK atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tanpa disertai informasi Konsumen; dan/atau 2. Rujukan Konsumen potensial dari PAJK kepada LJK atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan informasi Konsumen. |  |  |  |
| 1. pemberian layanan pendukung bagi LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk menyalurkan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen; | Yang dimaksud layanan pendukung adalah layanan yang disediakan oleh PAJK kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan berupa aktivitas menghubungkan Konsumen atau calon Konsumen dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi Konsumen untuk mendapatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.  Contoh: PAJK membantu LJK berupa BPR untuk menyelesaikan proses penerbitan deposito sampai dengan Konsumen menerima e-deposito. |  |  |  |
| 1. penyediaan produk dan/atau layanan eksklusif bekerja sama dengan mitra LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiata di sektor jasa keuangan; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kegiatan usaha lain yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud kegiatan usaha lain adalah kegiatan usaha yang dapat dipersamakan dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, maupun kegiatan usaha lain yang memenuhi pengertian layanan Agregasi jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Kegiatan Agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sebagai PAJK, dalam hal: |  |  |  |  |
| 1. Informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan berasal dari LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan; atau | Contoh: aplikasi marketing *inhouse bank.* |  |  |  |
| 1. kegiatan penghimpunan, penyaringan dan/atau pembandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan tidak dilakukan dalam rangka pemasaran atau penyaluran produk dan/atau layanan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; | Contoh: blog pribadi, berita atau informasi pembandingan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diterbitkan pers pada *website* atau situs berita, pembandingan produk dan/atau layanan jasa keuangan pada *website* atau situs sosial media, atau penghimpunan, penyaringan dan/atau perbandingan dari lembaga negara. |  |  |  |
| 1. Agregasi informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat dilakukan oleh PAJK merupakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud “berizin” yaitu segala bentuk perizinan yang dikenal di Otoritas Jasa Keuangan antara lain izin usaha, persetujuan, pendaftaran, penetapan, pencatatan, atau istilah lain yang dapat dipersamakan dengan itu. |  |  |  |
| 1. Agregasi yang dapat dilakukan oleh PAJK berupa: |  |  |  |  |
| 1. produk dan/atau layanan jasa keuangan yang merupakan kegiatan penghimpunan dana; | Contoh produk jasa keuangan yang merupakan kegiatan penghimpunan dana antara lain: Simpanan, deposito, giro. |  |  |  |
| 1. produk dan/atau layanan jasa keuangan yang merupakan kegiatan penyaluran dana; dan/atau | Contoh produk jasa keuangan yang merupakan kegiatan penyaluran dana antara lain: kredit, pendanaan, pembiayaan, atau pinjaman. |  |  |  |
| 1. produk dan layanan jasa keuangan sektor lainnya yang telah disetujui terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK yang melakukan Agregasi atas informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan membutuhkan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari sektor lain di Otoritas Jasa Keuangan wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha dimaksud. | Contoh:  PAJK yang akan melakukan Agregasi produk dan/atau layanan di sektor pasar modal dan diharuskan memperoleh izin atau persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sektor Pasar Modal, dapat melakukan kegiatan Agregasi setelah memperoleh izin atau persetujuan dimaksud, serta mematuhi berbagai ketentuan, batasan, larangan, maupun ketentuan lain yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 4 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |  |
| 1. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; |  |  |  |  |
| 1. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); |  |  |  |  |
| 1. pencantuman pihak utama dalam daftar tidak lulus berdasarkan mekanisme dana tata cara penilaian kembali pihak utama; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB III  KELEMBAGAAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Badan Hukum dan Permodalan |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 5 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Setiap pihak yang menyelenggarakan Agregasi wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Badan hukum PAJK harus berupa perseroan terbatas. |  |  |  |  |
| 1. Modal disetor untuk mendirikan PAJK ditetapkan paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) . |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal disetor untuk pendirian PAJK yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu. |  |  |  |  |
| 1. Sumber dana modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilarang berasal dari: |  |  |  |  |
| 1. kegiatan pencucian uang; |  |  |  |  |
| 1. kegiatan pendanaan terorisme; |  |  |  |  |
| 1. kegiatan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. kegiatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |  |
| 1. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan atas nama PAJK pada Bank Umum, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Umum di Indonesia. |  |  |  |  |
| 1. Dalam rangka peningkatan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, PAJK mencadangkan sebagian dari laba perseroan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 6 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK didirikan dan dimiliki oleh: |  |  |  |  |
| 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. warga negara asing dan/atau badan hukum asing. |  |  |  |  |
| 1. Komposisi kepemilikan saham PAJK oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak berjumlah 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor. |  |  |  |  |
| 1. Kepemilikan saham PAJK dilarang berasal dari penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dengan membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. |  |  |  |  |
| 1. Batasan kepemilikan asing pada PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi PAJK yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Kualifikasi Sumber Daya Manusia |  |  |  |  |
| Pasal 7 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK harus memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) Direksi. |  |  |  |  |
| 1. PAJK harus memiliki anggota direksi yang membawahi bidang tugas terkait teknologi informasi. |  |  |  |  |
| 1. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikasi atau pengalaman kerja di bidang teknologi informasi dan/atau LJK dan/atau di sektor jasa keuangan paling singkat 3 (tiga) tahun. |  |  |  |  |
| 1. Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai: |  |  |  |  |
| 1. Anggota Direksi; |  |  |  |  |
| 1. Anggota Dewan Komisaris; atau |  |  |  |  |
| 1. Pejabat eksekutif; |  |  |  |  |
| dari perusahaan, organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlaba. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Penggunaan Tenaga Kerja Asing |  |  |  |  |
| Pasal 8 |  |  |  |  |
| 1. PAJK dapat menggunakan tenaga kerja asing, dengan memenuhi kriteria: | Ketentuan dalam pasal ini mengatur tenaga kerja asing selain tenaga kerja asing yang menjabat sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris.  Yang dimaksud dengan “tenaga kerja asing” dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia. |  |  |  |
| 1. penggunaan tenaga kerja asing dilarang melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk masing-masing tenaga kerja asing untuk satu kali masa jabatan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menduduki jabatan: | Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” dan “konsultan” adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai. |  |  |  |
| 1. 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tenaga ahli; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. konsultan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggungjawabnya; | Keahlian sesuai dengan bidang tugas antara lain kemampuan di bidang model skor kredit, jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman. |  |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang mengenai keimigrasian, penggunaan tenaga kerja asing, dan ketenagakerjaan. |  |  |  |
| 1. Dalam penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAJK wajib: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan tenaga kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menyediakan 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping untuk masing-masing tenaga kerja asing; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menyelenggarakan alih teknologi dan/atau alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan penggunaan tenaga kerja asing. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara Aggregasi dilarang memanfaatkan tenaga kerja asing pada bidang tugas: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. personalia; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kepatuhan. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 9 |  |  |  |  |
| 1. Rencana penggunaan, perubahan penggunaan, dan masa jabatan tenaga kerja asing wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK wajib menyampaikan rencana penggunaan dan rencana perubahan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari rencana bisnis tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. nama dan informasi mengenai tenaga kerja asing; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. alasan penggunaan tenaga kerja asing dan alasan tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam bidang tugas yang dijabat tenaga kerja asing; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bidang tugas dan posisi atau jabatan yang akan diisi meliputi ruang lingkup dan kompetensi; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rencana masa jabatan; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rencana program alih teknologi dan/atau alih keahlian. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal akan dilakukan perubahan penggunaan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli, atau konsultan, PAJK harus menyampaikan rencana beserta alasan perubahan penggunaan tenaga kerja asing kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal PAJK akan mempekerjakan tenaga kerja asing, PAJK wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyampaikan dokumen terkait dengan ketenagakerjaan. | Yang dimaksud dengan “sejak tanggal” adalah perhitungan waktu dimulai pada saat tanggal yang ditentukan. Contoh: apabila PAJK terdaftar pada tanggal 5 Juni, maka tanggal dimaksud diperhitungkan. |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Tata Cara Permohonan Perizinan |  |  |  |  |
| Pasal 10 |  |  |  |  |
| 1. Lembaga Penjamin wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJK dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang memuat kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |  |
| 1. data pemegang saham: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara indonesia atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Tax Registry/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; |  |  |  |  |
| 1. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. daftar dan rincian pemegang saham berikut rincian masing-masing kepemilikan saham; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; |  |  |  |  |
| 1. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, jika ada; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. untuk anggota Direksi, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai data: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing; |  |  |  |  |
| 1. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pernyataan dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. untuk Dewan Komisaris, dengan melampirkan dokumen elektronik atau hasil pindai data: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pernyataan dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan format Surat Pernyataan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. keterangan mengenai PSP yang memuat paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. informasi terkait dengan PSP; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jumlah (persentase) kepemilikan PSP; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pernyataan dari PSP sesuai dengan format Surat Pernyataan PSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. struktur organisasi calon PAJK yang memuat informasi mengenai: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. struktur dan/atau fungsi jabatan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jumlah sumber daya manusia pada setiap struktur dan/atau fungsi jabatan; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pembagian tugas dan wewenang setiap struktur dan/atau fungsi jabatan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pedoman atau standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rencana bisnis tahunan untuk 3 (tiga) tahun pertama yang memuat paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. proyeksi laporan keuangan untuk 3 (tiga) tahun kedepan; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rencana penggunaan tenaga kerja asing; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bukti keahlian dan/atau latar belakang sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan/atau LJK antara lain berupa sertifikasi atau pengalaman kerja di bidang teknologi informasi, LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. dokumen data dan informasi terkait model bisnis; | Dokumen data dan informasi terkait model bisnis mencakup antara lain:   1. model dan proses bisnis; 2. evaluasi secara mandiri atas kesesuaian jenis ITSK dengan jenis ITSK yang telah lulus Sandbox; 3. manfaat produk, layanan, dan/atau inovasi yang ditawarkan (value proposition); 4. target pasar yang dilayani dan profil Konsumen; 5. struktur pendapatan (revenue) dan biaya yang dikenakan kepada pengguna (fee); 6. penjelasan terkait diagram aliran data dan jenis data yang terlibat; 7. mekanisme pengelolaan data yang dimulai sejak proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data; 8. output produk, layanan, dan/atau inovasi yang diberikan; 9. strategi dan/atau penerapan manajemen risiko; dan 10. data dan informasi terkait kebijakan dan prosedur pelindungan Konsumen diantaranya meliputi kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan Konsumen; dan 11. kebijakan dan prosedur ganti rugi Konsumen (consumer redress) |  |  |  |
| 1. metodologi dan teknologi yang digunakan dalam proses pemberian layanan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. situs *website* dan/atau aplikasi berbasis gawai yang dapat diakses oleh mitra dan/atau Konsumen disertai dengan *mock-up* berupa tangkapan layar (*screenshot*) untuk bagian profil perusahaan, product disclosure/information, dan pusat panggilan (*call center*); | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bukti pusat data dan pusat pemulihan bencana berada di wilayah Indonesia; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perjanjian kerja sama dengan penyedia pusat data dan pusat pemulihan bencana; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. dokumen terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi yang mencakup; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. sertifikat ISO 27001 yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi yang telah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau lembaga sertifikasi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat ISO 27001 (bagi lembaga sertifikasi yang tidak memiliki akreditasi dari KAN); atau | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. sertifikasi atau dokumen lainnya yang berisi kebijakan terkait keamanan sistem informasi yang memuat mekanisme pengendalian pada: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. aspek organisasi, yang diantaranya memuat delegasi wewenang dan struktur organisasi; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. aspek Sumber Daya Manusia, yang diantaranya memuat pemenuhan Sumber Daya Manusia pada posisi terkait IT, persyaratan minimum kompetensi, dan kebijakan/strategi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (sertifikasi/pelatihan); | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. aspek perangkat fisik, yang diantaranya memuat kebijakan calon PAJK terkait perangkat fisik IT tersedia dan aman; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. aspek teknologi, yang diantaranya memuat keamanan jaringan, aplikasi, dan data; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kebijakan dan prosedur pelindungan Data Pribadi; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bukti kesiapan sistem elektronik dan data kegiatan operasional calon PAJK; |  |  |  |  |
| 1. pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola PAJK; | Cukup j Cukup jelas.elas. |  |  |  |
| 1. kebijakan dan prosedur operasional; | Kebijakan dan prosedur operasional memuat paling sedikit:   1. langkah kegiatan pengamanan data; 2. level akses; 3. prosedur pengubahan data; 4. prosedur pemusnahan data; 5. pengamanan informasi; 6. rencana kelangsungan bisnis; 7. rencana pemulihan bencana; 8. pemantauan terhadap operasional termasuk jejak audit; 9. prosedur pemberian data Konsumen (bila ada); dan 10. prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan. |  |  |  |
| 1. bukti modal disetor telah disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan atas nama calon PAJK pada Bank Umum, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Umum di Indonesia; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak berasal dari: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kegiatan pencucian uang; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kegiatan pendanaan terorisme; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kegiatan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. arsitektur sistem teknologi informasi yang akan digunakan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penelitian dan analisis terhadap dokumen permohonan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penilaian kemampuan dan kepatutan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penelitian kesiapan operasional; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penilaian terhadap sistem teknologi informasi yang akan digunakan; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam rangka mendukung pelaksanaaan penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan kepada PAJK. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, calon PAJK harus menyampaikan pemenuhan kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal calon PAJK tidak memenuhi kelengkapan dan /atau menyesuaikan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon PAJK dianggap membatalkan permohonan izin usaha | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Keempat  Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik |  |  |  |  |
| Pasal 11 |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud dengan “sejak tanggal” adalah perhitungan waktu dimulai pada saat tanggal yang ditentukan.  Contoh: apabila Penyelenggara terdaftar pada tanggal 5 Januari 2025, maka tanggal dimaksud diperhitungkan. |  |  |  |
| 1. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK dilarang melakukan kegiatan usaha PAJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK wajib memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK wajib melakukan menjalankan Agregasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6). | Pertimbangan tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain keadaan kahar. |  |  |  |
| 1. Dalam hal PAJK: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tidak memenuhi ketentuan pada ayat (6); dan/atau |  |  |  |  |
| 1. tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan membatalkan izin usaha yang telah diterbitkan bagi PAJK. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kelima  Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Pihak Utama |  |  |  |  |
| Pasal 12 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pihak Utama. |  |  |  |  |
| 1. Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |  |
| 1. PSP; |  |  |  |  |
| 1. anggota Direksi; dan |  |  |  |  |
| 1. anggota Dewan Komisaris; |  |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama. |  |  |  |  |
| 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PAJK ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 13 |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pihak Utama terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama. | Contoh permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi antara lain dewan komisaris PAJK yang dinyatakan tidak lulus sebagai Pihak Utama di lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Penilaian kembali terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kembali bagi pihak utama PAJK ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Keenam Perubahan Kelembagaan dan Kepengurusan |  |  |  |  |
| Pasal 14 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penambahan modal disetor pada PAJK wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). |  |  |  |  |
| 1. Sumber dana dalam perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari: |  |  |  |  |
| 1. kegiatan pencucian uang; |  |  |  |  |
| 1. kegiatan pendanaan terorisme; |  |  |  |  |
| 1. kegiatan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. kegiatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 15 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal PAJK melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus disertai dengan dokumen terkait dengan kelengkapan dokumen anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |  |
| 1. Selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |  |
| 1. Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. |  |  |  |  |
| 1. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris walaupun telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang akan berhenti dan/atau mengundurkan diri, PAJK wajib memastikan persyaratan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap terpenuhi. |  |  |  |  |
| 1. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilaporkan secara tertulis oleh PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pemberhentian dan/atau pengunduran diri. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 16 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK yang melakukan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya pengendalian, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dengan PAJK lain, masing-masing PAJK wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Proses perubahan kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peralihan kepemilikan perseroan terbatas. |  |  |  |  |
| 1. Proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. |  |  |  |  |
| 1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya pengendalian, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan data rencana perubahan kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya pengendalian, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 17 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: |  |  |  |  |
| * 1. penambahan jumlah modal disetor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal selesainya proses penambahan modal disetor; |  |  |  |  |
| * 1. perubahan komposisi kepemilikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal rapat umum pemegang saham diselenggarakan; |  |  |  |  |
| * 1. perubahan struktur kelompok usaha sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif perubahan; |  |  |  |  |
| * 1. pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham; dan |  |  |  |  |
| * 1. pelaksanaan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan PAJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penambahan jumlah modal disetor, perubahan komposisi kepemilikan, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan/atau pelaksanaan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan  Sanksi Administratif |  |  |  |  |
| Pasal 18 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), ayat (3), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 11 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 12 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |  |
| 1. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; |  |  |  |  |
| 1. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); |  |  |  |  |
| 1. pencantuman pihak utama dalam daftar tidak lulus berdasarkan mekanisme dana tata cara penilaian kembali pihak utama; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB IV  TATA KELOLA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Penerapan Tata Kelola |  |  |  |  |
| Pasal 19 |  |  |  |  |
| 1. PAJK wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi. | Yang dimaksud dengan “tata kelola yang baik” adalah suatu tata cara pengelolaan PAJK yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). |  |  |  |
| 1. Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk: | Cukup jelas. |  |  |  |
| * 1. pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris; | Cukup jelas. |  |  |  |
| * 1. penerapan manajemen risiko, kepatuhan, audit intern, audit ekstern, dan prosedur operasional PAJK; | penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. |  |  |  |
| * 1. penanganan benturan kepentingan; | Penanganan benturan kepentingan antara lain memastikan pengambilan keputusan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PAJK didasarkan semata-mata atas kepentingan kegiatan usaha PAJK dimaksud. |  |  |  |
| * 1. kelayakan rencana bisnis tahunan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| * 1. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada otoritas; dan | Transparansi meliputi aspek pengungkapan (disclosure) dan bentuk pertanggungjawaban PAJK atas pemanfaatan data Konsumen.  Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan melalui publikasi dilakukan pada situs *website* dan/atau aplikasi PAJK. |  |  |  |
| * 1. penerapan fungsi pengendalian terhadap pelindungan Data Pribadi dan keamanan sistem informasi. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagai bagian dari laporan tahunan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, PAJK yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. | Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu segala bentuk kewajiban yang berlaku antara lain mencakup ketentuan terkait asosiasi Penyelenggara ITSK, program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, pelindungan konsumen, penerapan strategi anti fraud, serta pelindungan data pribadi, keimigrasian, penggunaan tenaga kerja asing, perpajakan, tata kelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Tata Kelola Sistem Informasi |  |  |  |  |
| Pasal 20 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Aspek tata kelola sistem informasi paling sedikit meliputi: |  |  |  |  |
| * 1. ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi; |  |  |  |  |
| * 1. penggunaan sistem yang aman dan andal paling sedikit mencakup: |  |  |  |  |
| 1. pengamanan dan perlindungan kerahasiaan data; |  |  |  |  |
| 1. pengembangan model; |  |  |  |  |
| 1. pemenuhan sertifikasi, standar keamanan, dan/atau keandalan sistem; dan |  |  |  |  |
| 1. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi. |  |  |  |  |
| * 1. penerapan standar keamanan siber; |  |  |  |  |
| * 1. pengamanan data dan informasi; dan |  |  |  |  |
| * 1. pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala; |  |  |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan kegiatan penawaran layanan, PAJK wajib memiliki situs *website* dan/atau aplikasi berbasis gawai yang dapat diakses oleh Konsumen yang paling sedikit memuat: |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai profil PAJK; |  |  |  |  |
| 1. keterbukaan informasi terkait produk dan layanan; dan |  |  |  |  |
| 1. informasi layanan Konsumen (*contact center*). |  |  |  |  |
| 1. PAJK wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 21 |  |  |  |  |
| 1. PAJK dapat menggunakan jasa pihak lain terkait Sistem Elektronik yang bersifat tidak kritikal (*supporting*); | Jasa pihak lain terkait sistem elektronik antara lain dapat digunakan dalam proses pengadaan, pemeliharaan, maupun pengembangan.  Penggunaan jasa terkait Sistem Elektronik yang bersifat tidak kritikal antara lain berkaitan dengan pengujian keandalan sistem dan keamanan pengelolaan data, pelayanan *helpdesk*, dan pelayanan pengaduan Konsumen. |  |  |  |
| 1. PAJK wajib memastikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi aspek tata kelola sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 22 |  |  |  |  |
| 1. PAJK wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan di dalam Sistem Elektronik PAJK. | Yang dimaksud rekam jejak audit terhadap kegiatan PAJK antara lain terkait penggunaan data Konsumen untuk LJK, keakuratan informasi yang diberikan kepada Konsumen, dan pemuusnahan data Konsumen yang sudah tidak menggunakan layanan PAJK. |  |  |  |
| 1. PAJK wajib memastikan bahwa Sistem Elektronik yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Keempat  Sanksi Administratif |  |  |  |  |
| Pasal 23 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) di atas dapat dikenakan sanksi berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |  |
| 1. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; |  |  |  |  |
| 1. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); |  |  |  |  |
| 1. pencantuman pihak utama dalam daftar tidak lulus berdasarkan mekanisme dana tata cara penilaian kembali pihak utama; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB V  PENYELENGGARAAN AGREGASI |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian kesatu  Kerja Sama LJK dan/ atau Pihak Yang Melakukan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan |  |  |  |  |
| Pasal 24 |  |  |  |  |
| 1. PAJK wajib memiliki kerja sama dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk melaksanakan Agregasi yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama. | Cukup jelas |  |  |  |
| 1. PAJK wajib memastikan bahwa LJK /pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh persetujuan produk dan/atau layanan dari Otoritas Jasa Keuangan serta melengkapi surat pernyataan bahwa produk dan/atau layanan dapat dipasarkan secara digital dan tidak dalam pembatasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jangka waktu perjanjian; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugas; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. mekanisme perubahan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. mekanisme pengaduan dari pihak internal maupun eksternal terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. mekanisme distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan (bila ada); | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. mekanisme pertukaran dan penggunaan data Konsumen (bila ada); dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pernyataan bahwa LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan bertanggung jawab atas seluruh proses yang berkaitan dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dimiliki oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK dapat bekerjasama dengan pihak selain LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan penyedia produk dan/atau layanan jasa keuangan dalam rangka: | Cukup jelas |  |  |  |
| 1. pelaksanaan sebagian fungsi dalam menyelenggarakan Agregasi; | Contoh: kerjasama dengan pihak jasa pembayaran untuk membantu mengintegrasikan sistem pembayaran dengan jasa Agregasi. |  |  |  |
| 1. pengembangan sistem elektronik yang bersifat tidak kritikal (*supporting*) dengan memperhatikan prinsip pengelolaan data dan pengendalian risiko yang memadai;dan/atau | Menggunakan jasa pihak lain antara lain penggunaan pihak eksternal untuk melaksanakan pengujian keandalan sistem dan keamanan pengelolaan data, pelayanan *helpdesk*, dan pelayanan pengaduan Konsumen. |  |  |  |
| 1. pemberian jasa nilai tambah kepada Konsumen atau LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. | Contoh: inovasi lain seperti pemeringkat kredit berbasis data alternatif untuk menilai kelayakan kredit, lembaga verifikator untuk membantu KYC, dan pihak lain yang relevan dalam mendukung penambahan nilai dalam kegiatan Agregasi. |  |  |  |
| 1. Kerja sama antara PAJK dengan LJK, pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan/atau pihak selain LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Kegiatan PAJK |  |  |  |  |
| Pasal 25 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam menjalankan kegiatan Agregasi, aplikasi dan/atau *website* PAJK wajib paling sedikit menyajikan informasi berupa: |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai profil PAJK; |  |  |  |  |
| 1. perbandingan atau sinergi informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan; |  |  |  |  |
| 1. informasi bahwa produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditawarkan bukan produk yang diterbitkan oleh PAJK dan tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko terkait produk dan/atau layanan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; |  |  |  |  |
| 1. layanan edukasi konsumen terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan; |  |  |  |  |
| 1. layanan pengaduan Konsumen; dan |  |  |  |  |
| 1. informasi layanan Konsumen *(contact center)* |  |  |  |  |
| 1. Perbandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap produk dan/atau layanan jasa keuangan paling sedikit memuat: |  |  |  |  |
| 1. harga atau biaya; |  |  |  |  |
| 1. fitur utama; |  |  |  |  |
| 1. manfaat layanan; |  |  |  |  |
| 1. pengecualian layanan; |  |  |  |  |
| 1. batasan layanan; |  |  |  |  |
| 1. ringkasan produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan |  |  |  |  |
| 1. informasi relevan lainnya yang mungkin diperlukan Konsumen dalam mengambil keputusan untuk menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Perbandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan atas jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sama dan dapat diperbandingkan secara akurat, jujur, jelas, objektif, dan transparan. |  |  |  |  |
| 1. Layanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kegiatan Agregasi yang dilaksanakan oleh PAJK wajib tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen. |  |  |  |  |
| 1. Dalam menyajikan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PAJK wajib melakukan uji tuntas atas LJK dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang di-Agregasi-kan untuk memastikan legalitas, perizinan, dan keakuratan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dari waktu ke waktu. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 26 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam kegiatan Agregasi dan penyajian informasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) PAJK dapat menyediakan fitur dan layanan yang mencakup: |  |  |  |  |
| * 1. sortir dan filter untuk melakukan klasifikasi informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan berdasarkan kebutuhan Konsumen; |  |  |  |  |
| * 1. usulan produk dan/atau layanan jasa keuangan sesuai dengan personalisasi kebutuhan Konsumen berdasarkan hasil analisa data Konsumen |  |  |  |  |
| * 1. penilaian atau rating atas produk dan/ atau layanan jasa keuangan untuk memudahkan Konsumen dalam memilih produk dan/ atau layanan jasa keuangan; |  |  |  |  |
| * 1. simulasi penghitungan manfaat dan kewajiban dari produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |  |
| * 1. fitur dan layanan lainnya yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |  |
| 1. Fitur dan layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan secara adil, objektif, transparan, tidak memihak, tidak terpengaruh hubungan kontraktual dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan mengungkapkan metodologi atau dasar analisa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 27 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK dapat melakukan pertukaran data dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan Agregasi. |  |  |  |  |
| 1. Dalam menjalankan pertukaran data sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan enkripsi atau metode lain dalam rangka menjaga kerahasian dan keamanan data. |  |  |  |  |
| 1. Kegiatan pertukaran data sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan Data Pribadi. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 28 |  |  |  |  |
| Dalam rangka pemberian jasa Agregasi yang bernilai tambah kepada Konsumen, PAJK wajib memiliki: |  |  |  |  |
| 1. kerja sama dengan lebih dari satu LJK pada jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sama; | Contoh: PAJK bekerjasama untuk melakukan agregasi dengan 2 (dua) Bank yang menyediakan produk Deposito |  |  |  |
| 1. portal atau aplikasi milik PAJK untuk melakukan penyaluran informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penyediaan layanan agregasi dengan memanfaatkan konektivitas antara sistem elektronik milik PAJK dengan sistem elektronik milik mitra LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; | Yang dimaksud dengan memanfaatkan konektivitas antara sistem elektronik milik PAJK dengan sistem elektronik milik mitra LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah layanan Agregasi yang dapat memanfaatkan application programming interface (API) atau program serupa yang memberikan kemudahan bagi LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk menawarkan produk/layanan jasa keuangan atau Konsumen untuk dapat memperoleh akses ke produk/layanan jasa keuangan secara aman dan tanpa hambatan. |  |  |  |
| 1. pemberian umpan balik kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan Konsumen; dan/atau | Yang dimaksud dengan umpan balik kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah upaya PAJK untuk memberikan informasi kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan atas *insight market* yang diperoleh melalui pemrosesan data pada *website*/aplikasi PAJK untuk dapat menyediakan produk jasa keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Konsumen. |  |  |  |
| 1. inovasi pada layanan dan/atau fitur lainnya yang memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi Konsumen dan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. | Yang dimaksud dengan inovasi pada layanan dan/atau fitur lainnya adalah seluruh inovasi dan pengembangan yang dapat dilakukan PAJK untuk meningkatkan kemudahan, efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga  Kewajiban PAJK |  |  |  |  |
| Pasal 29 |  |  |  |  |
| Dalam melaksanakan Agregasi, PAJK wajib: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. mempunyai izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |  |
| 1. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan Agregasi sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; |  |  |  |  |
| 1. mengungkapkan kepada Konsumen bahwa PAJK hanya melakukan Agregasi dan tidak bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; |  |  |  |  |
| 1. memastikan perjanjian baku atau syarat dan ketentuan antara PAJK dan Konsumen tidak memuat klausula eksonerasi/eksemsi yang dilarang ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dibidang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; |  |  |  |  |
| 1. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap Agregasi yang dilakukan oleh PAJK; |  |  |  |  |
| 1. memastikan keandalan dan keamanan Sistem Elektronik yang digunakan PAJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; |  |  |  |  |
| 1. melaksanakan prinsip kerahasiaan data Konsumen paling sedikit atas Data Pribadi dan data transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |  |  |  |
| 1. tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait Pelindungan Data Pribadi, dalam hal PAJK melakukan pengendalian atau pemrosesan data Konsumen untuk kepentingan penyelenggaraan Agregasi; |  |  |  |  |
| 1. menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan atau pemrosesan data Konsumen kepada Konsumen; dan |  |  |  |  |
| 1. mencantumkan informasi penggunaan data bahwa Konsumen dapat meminta PAJK untuk menghapus Data Pribadi miliknya dalam hal Konsumen tidak lagi menggunakan layanan PAJK atau mencabut persetujuan penggunaan data Konsumen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Keempat  Larangan PAJK |  |  |  |  |
| Pasal 30 |  |  |  |  |
| PAJK dilarang: |  |  |  |  |
| 1. melakukan aktivitas terkait penghimpunan dana, penyimpanan dana, dan/atau pengelolaan dana Konsumen; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; | Yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat pada ketentuan ini meliputi seluruh kegiatan yang dianggap sebagai tindakan monopoli atau memberikan hambatan kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk dapat mengaggregasi produk jasa keuangannya. |  |  |  |
| 1. menyediakan layanan Agregasi dalam bentuk *platform user generated content* atau penyalinan konten tanpa kerjasama dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. | Yang dimaksud *platform user generated content* adalah pemberian informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dari Konsumen yang dilakukan oleh PAJK tanpa melakukan kurasi atau uji tuntas.  Yang dimaksud dengan kegiatan penyalinan konten meliputi kegiatan perambanan (crawling/scraping) yaitu kegiatan pengambilan data dari *website* atau aplikasi LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tanpa persetujuan atau kerjasama dengan LJK. |  |  |  |
| 1. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait produk jasa keuangan yang disediakan oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan ditawarkan oleh PAJK; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memastikan atau menjanjikan hasil investasi dan/atau manfaat khusus tertentu dari produk jasa keuangan yang disediakan oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan ditawarkan oleh PAJK; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menerima kuasa untuk melakukan transaksi dari Konsumen; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. membocorkan dan/atau menyalahgunakan Data Pribadi dan/atau data lainnya milik Konsumen secara tidak sah. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kelima  Sanksi Administratif |  |  |  |  |
| Pasal 31 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 serta melanggar ketentuan Pasal 30 dapat dikenakan sanksi berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |  |
| 1. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; |  |  |  |  |
| 1. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); |  |  |  |  |
| 1. pencantuman pihak utama dalam daftar tidak lulus berdasarkan mekanisme dana tata cara penilaian kembali pihak utama; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB VI  PENGAWASAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Pengawasan dan Pelaporan |  |  |  |  |
| Pasal 32 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap PAJK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 33 |  |  |  |  |
| 1. PAJK wajib menyampaikan laporan berkala, rencana bisnis tahunan, dan laporan lainnya yang bersifat insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Laporan insidentil mencakup antara lain:   * 1. laporan terkait perubahan kegiatan usaha, antara lain: perubahan produk dan/atau aktivitas yang terkait dengan model bisnis atau kerjasama;  1. laporan terkait kelembagaan, antara lain perubahan kepemilikan saham, kepengurusan, alamat kantor, anggaran dasar/anggaran rumah tangga; 2. laporan terkait insiden, antara lain fraud, force majeure, sengketa hukum, dan/atau serangan siber; dan/atau 3. laporan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu. |  |  |  |
| 1. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan bulanan; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan triwulanan; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan tahunan. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK wajib menyusun laporan dan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa: | Cukup jelas. |  |  |  |
| * 1. Laporan evaluasi mandiri yang disampaikan setiap triwulan; dan | Cukup jelas. |  |  |  |
| * 1. Laporan realisasi rencana bisnis tahunan yang disampaikan setiap triwulan 2 (dua) dan triwulan 4 (empat). | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan PKA. | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta laporan lain selain laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Laporan lain selain laporan insidentil dapat berupa laporan penggunaan data Konsumen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 34 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib dilaksanakan sebagai berikut: |  |  |  |  |
| 1. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir; |  |  |  |  |
| 1. laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b disampaikan setiap 3 (tiga) bulan bersamaan dengan penyampaian laporan bulanan ; dan |  |  |  |  |
| 1. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 30 April pada tahun berikutnya. |  |  |  |  |
| 1. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a periode bulan Oktober dilengkapi dengan Rencana Bisnis Tahunan. |  |  |  |  |
| 1. Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib disampaikan bersamaan dengan laporan bulanan periode Oktober yang disampaikan bulan November tahun berjalan. |  |  |  |  |
| 1. Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya insiden dimaksud. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan dan rencana bisnis tahunan jatuh pada hari, hari libur, batas waktu penyampaian laporan dan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu pada hari kerja berikutnya. |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang menyampaikan laporan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dinyatakan terlambat menyampaikan laporan. |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), dinyatakan tidak menyampaikan laporan. |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pelaksanaan pelaporan PAJK yang telah memiliki izin usaha mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Sanksi Administratif |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 35 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) di atas dapat dikenakan sanksi berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |  |
| 1. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; |  |  |  |  |
| 1. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); |  |  |  |  |
| 1. pencantuman pihak utama dalam daftar tidak lulus berdasarkan mekanisme dana tata cara penilaian kembali pihak utama; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak menyampaikan laporan bulanan setelah batas akhir penyampaian laporan atau menyampaikan laporan 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan. |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak menyampaikan laporan evaluasi mandiri setelah batas akhir penyampaian laporan atau menyampaikan laporan 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan. |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak menyampaikan laporan rencana bisnis tahunan setelah batas akhir penyampaian laporan atau menyampaikan laporan 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan. |  |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak menyampaikan laporan tahunan setelah batas akhir penyampaian laporan atau menyampaikan laporan 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB VII  PENGHENTIAN KEGIATAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 36 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK yang akan menghentikan kegiatan usaha wajib menyampaikan permohonan penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dengan melampirkan: |  |  |  |  |
| 1. risalah rapat umum pemegang saham mengenai rencana penghentian kegiatan usaha; |  |  |  |  |
| 1. alasan penghentian; |  |  |  |  |
| 1. rencana penyelesaian seluruh kewajiban; |  |  |  |  |
| 1. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |  |
| 1. bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan kantor pelayanan pajak untuk tahun terakhir sebelum tanggal permohonan; dan |  |  |  |  |
| 1. penyelesaian seluruh kewajiban kepada pihak ketiga yang mencakup Konsumen, kreditur dan/atau pihak terkait. |  |  |  |  |
| 1. Risalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui rencana penghentian kegiatan usaha dan perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan kewajiban PAJK. |  |  |  |  |
| 1. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penghentian kegiatan usaha yang mewajibkan PAJK: |  |  |  |  |
| 1. menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai PAJK; |  |  |  |  |
| 1. mengumumkan penghentian kegiatan usaha sebagai PAJK dan rencana penyelesaian kewajiban dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, portal atau situs resmi PAJK, dan akun resmi media sosial PAJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat penghentian kegiatan usaha; |  |  |  |  |
| 1. segera menyelesaikan seluruh kewajiban PAJK; dan |  |  |  |  |
| 1. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban PAJK. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal seluruh kewajiban PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas telah diselesaikan, PAJK mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan laporan yang memuat paling sedikit meliputi: |  |  |  |  |
| 1. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha; |  |  |  |  |
| 1. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud di atas; |  |  |  |  |
| 1. pelaksanaan penyelesaian kewajiban PAJK; |  |  |  |  |
| 1. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban PAJK ; dan |  |  |  |  |
| 1. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah penyelesaian kewajiban PAJK telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. |  |  |  |  |
| 1. Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha PAJK. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 37 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menerbitkan keputusan pencabutan, dalam hal: |  |  |  |  |
| 1. PAJK melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan sanksi berupa pencabutan izin usaha; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. |  |  |  |  |
| 1. Sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila di kemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, segala kewajiban menjadi tanggung jawab pemegang saham PAJK. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi PAJK yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB VIII  ASPEK KEPATUHAN LAINNYA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu  Aspek Kepatuhan Lainnya |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 38 | Cukup jelas. |  |  |  |
| PAJK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib tunduk pada kewajiban yang berlaku pada POJK 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK serta segala bentuk kewajiban yang berlaku antara lain mencakup ketentuan terkait asosiasi Penyelenggara ITSK, program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, pelindungan konsumen, serta pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Sanksi Administratif |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 39 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40 ayat (3) dikenakan sanksi berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |  |
| 1. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; |  |  |  |  |
| 1. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); |  |  |  |  |
| 1. pencantuman pihak utama dalam daftar tidak lulus berdasarkan mekanisme dana tata cara penilaian kembali pihak utama; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB IX  KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 40 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent,* dan *wealthtech* yang telah lulus sandbox atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan harus mengajukan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent,* dan *wealthtech* tidak mengajukan izin usaha dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha PAJK dinyatakan sebagai PAJK yang tidak memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent,* dan *wealthtech* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menghentikan kegiatan usaha dan melakukan penyelesaian kewajiban kepada Konsumen paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan usaha dinyatakan tidak berizin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent,* dan *wealthtech* telah memperoleh izin usaha, surat lulus peserta sandbox atau surat tanda bukti terdaftar menjadi tidak berlaku. |  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent,* dan *wealthtech* yang telah memperoleh status terdaftar dan telah memiliki tanda terdaftar penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kegiatan usaha PKA, dikecualikan dari ketentuan mengenai pendaftarann penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11. |  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara *aggregator, financing agent, funding agent,* dan *wealthtech* yang telah memperoleh status terdaftar dan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap melaksanakan kegiatan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB X  KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pasal 41 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2024 |  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal |  |  |  |  |
| MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  SUPRATMAN ANDI AGTAF |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR |  |  |  |  |